

Build Connections: Politics and Tax Aggressiveness in the Construction Sector

Diarany Sucahyati¹, Vicky Vendy, Condro Widodo

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹diarany.s.ak@upnjatim.ac.id¹

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between political connections and tax aggressiveness in 461 construction sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2023 period, using multiple linear regression analysis. The findings reveal that politically connected firms in the construction sector exhibit higher levels of tax aggressiveness. This suggests that protection from political affiliates provides these companies with greater flexibility in formulating aggressive tax strategies. The study focuses on the construction sector due to its close linkage with government policies, particularly in project procurement and tender processes. Therefore, this research seeks to specifically assess the impact of political connections on companies operating in a business sector that is highly sensitive to government policy interventions.

Keywords: *political connections, tax aggressiveness, construction sector, tax avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada 461 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023 menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan terkoneksi politik yang berada di sektor konstruksi memiliki agresivitas pajak yang tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan dari pihak terkoneksi politik memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan yang agresif. Penelitian ini berfokus pada sektor konstruksi karena sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam proses pengadaan proyek dan pemenang tender. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih spesifik dampak koneksi politik terhadap perusahaan yang berada dalam sektor bisnis yang sensitif terhadap intervensi kebijakan pemerintah.

Kata kunci: koneksi politik, agresivitas pajak, sektor konstruksi, penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), sektor ini menyumbang rata-rata 10,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode 2019–2023 serta menyerap sekitar 8% tenaga kerja nasional. Namun, di balik peran strategis tersebut, sektor ini juga menyimpan potensi risiko tinggi dalam hal kepatuhan pajak, terutama dalam praktik

agresivitas pajak. Agresivitas pajak mengacu pada strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, baik dengan cara legal, maupun melalui strategi agresif yang berada pada batas abu-abu legalitas (Desai & Dharmapala, 2006; Chen et al., 2010).

Salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku agresivitas pajak adalah koneksi politik. Koneksi politik pada penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan politik yang dimiliki komisaris ataupun direksi perusahaan sebagaimana tercantum peraturan Bank Indonesia tahun 2010 terkait *Politically Exposed Person* (PEP) seperti kepala negara, pejabat setingkat menteri, eksekutif atau ketua partai politik, dsb. Perusahaan dengan koneksi politik diyakini memiliki keunggulan akses terhadap proyek pemerintah, kemudahan mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah, pengawasan yang lebih longgar, bahkan intervensi terhadap kebijakan fiskal yang dianggap menguntungkan (Faccio, 2006; Fu et al., 2017; Goldman et al., 2013). Fenomena ini tercermin dalam beberapa kasus di Indonesia yang dilaporkan oleh media massa, dimana ditemukan indikasi keterlibatan elit politik dalam skema penetapan tender dan penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan besar (Kompas, 2023; Tempo, 2022).

Keberadaan koneksi politik memberikan insentif bagi manajemen perusahaan untuk lebih berani mengambil risiko dalam menyusun strategi penghindaran pajak yang agresif. Dalam konteks hubungan antara perusahaan dan pemerintah, terdapat potensi konflik kepentingan yang terjadi akibat tidak sejalanannya tujuan antara otoritas publik (sebagai pemangku kepentingan fiskal negara) dan manajemen perusahaan (yang ingin memaksimalkan laba). Ketidakseimbangan kekuasaan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi, di mana perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih sulit diawasi karena kemungkinan adanya intervensi atau perlindungan politik di belakangnya (Lanis & Richardson, 2011; Liu et al., 2018). Hal ini mengakibatkan biaya pengawasan menjadi tinggi, dan efektivitas pengendalian negara terhadap perusahaan terkoneksi politik menjadi lemah. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak karena perusahaan menikmati perlindungan institusional (Handoko et al., 2021; Kim dan Zhang, 2016; Wahab et al., 2017).

Penelitian ini menggunakan 461 sampel perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini berfokus pada sektor konstruksi karena sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam proses pengadaan proyek dan pemenangan tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih spesifik dampak koneksi politik terhadap perusahaan yang berada dalam sektor bisnis yang sensitif terhadap intervensi kebijakan pemerintah, sehingga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai praktik penghindaran pajak serta memberikan kontribusi dalam

merancang kebijakan fiskal yang lebih adil dan efektif, terutama dalam konteks hubungan ekonomi dengan kekuasaan politik di negara berkembang seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 461 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Data penelitian diperoleh dari basis data Orbis serta laporan tahunan perusahaan, yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Stata versi 17. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan memasukkan *fixed effect* tahunan untuk mengendalikan pengaruh variabel tahun yang dapat menyebabkan bias pada hasil estimasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Sumber: Data diolah, 2025

Variabel	Pengukuran
Variabel Dependen	
Agresivitas Pajak : (ETR)	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR) = Beban pajak / laba sebelum pajak
CETR)	<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) = Pajak dibayar tunai / laba sebelum pajak
Variabel Independen	
Koneksi Politik (PCON)	Diukur menggunakan variabel <i>dummy</i> , dengan nilai 1 jika perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 jika tidak.
Variabel Kontrol	
<i>Financial constraint</i> (FC)	$FC_{it} = -0.091 \times (\text{cash flow}/TA) - 0.062 \times (1 \text{ if } dv > 0, 0 \text{ if } dv = 0) + 0.021 \times (LTD/TA) - 0.044 \times \ln TA - 0.035 \times SG$
<i>Return of Asset</i> (ROA)	Laba bersih / total aset
Pertumbuhan Penjualan (SG)	(Penjualan t - penjualan t-1) / penjualan t-1
Belanja Modal (CAPEX)	((Aset tetap t - aset tetap t-1) + penyusutan) / total aset
Intensitas Modal (CIN)	Aset tetap / total aset
<i>Leverage</i> (LEV)	Total utang / total aset
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Ln (total aset)
Kualitas Audit (BIG4)	1 jika perusahaan diaudit oleh KAP BIG 4 dan 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP selain BIG 4

Persentase Eksekutif persentase manajer wanita
Manajer Wanita (WEMP)

Pengembangan Hipotesis

Koneksi politik sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan agresivitas pajak terutama pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang lemah (Chen dan Chen, 2019; Khlif dan Amara, 2019; Kim dan Zhang, 2016; Liu et al., 2018; Rudyanto et al., 2023; Wahab et al., 2017). Dalam konteks hubungan antara perusahaan dan pemerintah, terdapat potensi konflik kepentingan yang terjadi akibat tidak sejalanannya tujuan antara otoritas dan manajemen perusahaan. Keberadaan koneksi politik memungkinkan adanya intervensi atau perlindungan politik di belakangnya sehingga perusahaan bisa memiliki ruang gerak yang lebih luas (Lanis & Richardson, 2011; Liu et al., 2018). Namun, perusahaan dengan tata kelola yang kuat atau tingkat kepatuhan publik yang tinggi, koneksi politik dapat digunakan untuk menjaga reputasi perusahaan, sehingga menurunkan insentif untuk menghindari pajak secara agresif (Iswari et al., 2023; Zhang et al., 2021).

H₁: Perusahaan yang Memiliki Koneksi Politik Memiliki Tingkat Agresivitas Pajak yang Lebih Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Minimum	Maximum
PCON	0.219	0.000	0.000	1.000
FC	-1.245	-1.235	-1.480	-0.994
ETR	0.146	0.175	-1.930	1.815
CETR	-0.295	-0.144	-7.615	2.799
ROA	4.155	3.520	-44.330	43.070
SG	0.103	0.048	-0.995	14.640
CAPEX	0.050	0.034	-0.663	0.725
CIN	0.496	0.490	0.016	0.963
LEV	1.206	0.821	-10.314	23.872
SIZE	28.156	27.897	22.826	32.316
BIG4	0.256	0.000	0.000	1.000
WEMP	4.539	4.000	2.000	14.067

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sekitar 21,9% dari total observasi perusahaan konstruksi di Indonesia pada periode 2019–2023 memiliki koneksi politik (PCON). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak terkoneksi politik dalam perusahaan konstruksi bukan fenomena yang langka, dan sejalan dengan temuan di negara berkembang lainnya seperti Malaysia yang memiliki persentase koneksi politik sebesar 25% pada perusahaan publik (Adhikari, Derashid,

& Zhang, 2006). Sementara itu, nilai rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 14,6% dan nilai median 17,5% menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan membayar pajak di bawah tarif PPh badan normal (22%), yang mengindikasikan adanya praktik agresivitas pajak. Nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang negatif (-0,295) menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan bahkan mengalami restitusi atau pembayaran pajak yang lebih kecil dari akumulasi beban fiskal, yang sering terjadi dalam proyek konstruksi jangka panjang.

Tabel 3. Korelasi Pearson

	ETR	CETR	PCON	FC	ROA	SG	CAPEX	CIN	LEV	SIZE	BIG4	WEMP
ETR	1.000											
CETR	0.113** (0.015)	1.000										
PCON	0.006 (0.894)	- 0.093** (0.045)	1.000									
FC	-0.077* (0.097)	-0.013 (0.784)	- 0.350*** (0.000)	1.000								
ROA	0.108** (0.020)	-0.060 (0.197)	0.096** (0.040)	- 0.267*** (0.000)	1.000							
SG	0.033 (0.477)	0.024 (0.602)	0.066 (0.157)	- 0.186*** (0.000)	0.177*** (0.000)	1.000						
CAPEX	0.059 (0.207)	0.016 (0.729)	0.060 (0.201)	-0.037 (0.424)	0.204*** (0.000)	0.082* (0.078)	1.000					
CIN	-0.037 (0.433)	0.060 (0.200)	0.090* (0.053)	-0.087* (0.061)	- 0.300*** (0.000)	0.003 (0.948)	0.198*** (0.000)	1.000				
LEV	- 0.115** (0.014)	0.060 (0.199)	-0.022 (0.644)	-0.034 (0.460)	- 0.178*** (0.000)	0.032 (0.491)	-0.089* (0.056)	0.096** (0.039)	1.000			
SIZE	0.046 (0.324)	-0.012 (0.794)	0.335*** (0.000)	- 0.935*** (0.000)	0.158*** (0.001)	-0.051 (0.279)	0.015 (0.747)	0.112** (0.016)	0.032 (0.490)	1.000		
BIG4	0.117** (0.012)	-0.080* (0.086)	0.206*** (0.000)	- 0.477*** (0.000)	0.206*** (0.000)	-0.043 (0.360)	-0.010 (0.823)	-0.054 (0.248)	-0.037 (0.422)	0.497*** (0.000)	1.000	
WEMP	0.082* (0.079)	0.027 (0.557)	0.285*** (0.000)	- 0.474*** (0.000)	0.134*** (0.004)	-0.036 (0.436)	0.007 (0.882)	0.110** (0.018)	-0.037 (0.425)	0.504*** (0.000)	0.445*** (0.000)	1.000

p-values in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara koneksi politik dan CETR ($r = -0,093$; $p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak secara tunai dalam jumlah yang lebih kecil. Hasil ini sejalan dengan temuan Wu, Lanis, dan Draper (2022) yang mendokumentasikan bahwa koneksi politik di perusahaan China mempengaruhi strategi penghindaran pajak secara kas, bukan secara akrual. Di sisi lain, tidak ditemukan hubungan signifikan antara koneksi politik dan ETR, yang berarti bahwa strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan politik cenderung tidak tercermin dalam beban pajak akrual. Hal ini menegaskan temuan sebelumnya bahwa perusahaan terkoneksi politik lebih memilih memanfaatkan celah dalam pembayaran pajak tunai seperti penundaan pembayaran, restitusi pajak, atau penghindaran melalui fasilitas fiskal proyek pemerintah (Yuwono & Rahmawati, 2023).

Tabel 4. Uji Karakteristik Perusahaan (*Independent T-Test*)

	NON-PCON	PCON	Coef	t-value
FC	-1.229	-1.299	0.069***	8.005
ETR	0.145	0.149	-0.004	-0.133
CETR	-0.245	-0.473	0.227**	2.009
ROA	3.640	5.989	-2.349**	-2.062
SG	0.074	0.203	-0.128	-1.419
CAPEX	0.047	0.062	-0.015	-1.281
CIN	0.486	0.534	-0.048*	-1.941
LEV	1.238	1.092	0.146	0.462
SIZE	27.849	29.248	-1.399***	-7.620
BIG4	0.208	0.426	-0.217***	-4.512
WEMP	4.227	5.651	-1.424***	-6.378

Pengujian perbedaan rata-rata juga menunjukkan bahwa CETR perusahaan terkoneksi politik lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan non-politik ($-0,473$ vs $-0,245$), dengan nilai *t* sebesar 2,009. Hal ini memperkuat bukti bahwa koneksi politik digunakan untuk memperoleh keuntungan fiskal. Selain itu, perusahaan dengan koneksi politik juga memiliki karakteristik tertentu, seperti ukuran aset yang lebih besar, diaudit oleh auditor BIG4, dan memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa perusahaan politik cenderung memiliki sumber daya yang cukup besar untuk memanfaatkan koneksi politik secara strategis, baik dalam pengelolaan proyek pemerintah maupun dalam efisiensi fiskal. Adanya hubungan negatif antara koneksi politik dan penggunaan manajemen laba ekstrem (FC) juga menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi cenderung mengganti strategi

manajemen laba dengan strategi penghindaran pajak, sesuai dengan teori substitusi oportunistik (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

$$ETR; CETR_{i,t} = \alpha + \beta_1 PCON_{i,t} + \beta_2 FC_{i,t} + \beta_3 ROA_{i,t} + \beta_4 SG_{i,t} + \beta_5 CAPEX_{i,t} + \beta_6 CIN_{i,t} + \beta_7 LEV_{i,t} + \beta_8 SIZE_{i,t} + \beta_9 BIG4_{i,t} + \beta_{10} WEMP_{i,t} + \beta_{11} YEAR + \beta_{12} INDUSTRY + \varepsilon$$

	(1) ETR	(2) CETR
PCON	-0.031 (-1.13)	-0.286* (-1.72)
FC	-1.193 (-1.36)	-4.819 (-1.52)
ROA	0.000 (0.26)	-0.007* (-1.80)
SG	-0.013 (-0.60)	-0.064 (-0.91)
CAPEX	0.133 (0.92)	0.313 (1.34)
CIN	-0.033 (-0.41)	0.123 (0.46)
LEV	-0.011** (-2.37)	0.016 (1.61)
SIZE	-0.056 (-1.40)	-0.193 (-1.36)
BIG4	0.055** (2.35)	-0.237* (-1.69)
WEMP	0.008 (1.34)	0.045 (1.36)
CONSTANT	0.293 (1.35)	-1.015 (-1.08)
Year Dummies	Included	Included
R Squared	0.070	0.043
Number of Observation	461	461

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Hasil regresi linier memperkuat temuan sebelumnya. Variabel koneksi politik (PCON) tidak signifikan terhadap ETR, namun berpengaruh negatif secara signifikan terhadap CETR (koefisien -0,286; $t = -1,72$), menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap pengurangan pembayaran pajak secara kas, bukan secara akrual. Hasil ini mendukung hipotesis utama penelitian bahwa koneksi politik

berkaitan positif dengan agresivitas pajak. Selain itu, variabel *Leverage* (LEV) juga menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap ETR, mendukung peran *debt tax shield* dalam strategi perencanaan pajak. Auditor dari Kantor Akuntan Publik BIG4 secara signifikan meningkatkan ETR, namun menurunkan CETR, menunjukkan bahwa pengawasan akuntansi formal tidak sepenuhnya menghambat penghindaran pajak berbasis kas. Ini sejalan dengan Higgins et al. (2022), yang mencatat bahwa pengawasan akrual tidak selalu selaras dengan kontrol atas arus kas fiskal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan konstruksi dengan koneksi politik cenderung memanfaatkan keleluasaan fiskal melalui kas, bukan dengan memanipulasi akrual laporan keuangan. Dalam konteks Indonesia, di mana koneksi politik dan pelaku usaha cukup erat, hasil ini menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan berbasis jaringan (*network-based compliance risk*) dalam sistem perpajakan. Pengawasan terhadap entitas dengan hubungan ke tokoh politik atau proyek APBN sebaiknya diperkuat guna mencegah penyalahgunaan fasilitas fiskal. Secara teoritis, hasil ini mendukung pendekatan *agency theory* di mana koneksi politik digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengurangi kontribusi fiskal perusahaan kepada negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak berbasis akrual (ETR), namun memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap beban pajak berbasis kas (CETR). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak yang berfokus pada aspek kas, seperti penundaan pembayaran, optimalisasi restitusi, atau pemanfaatan fasilitas fiskal proyek pemerintah.

Hasil ini selaras dengan Teori Agensi Tipe 3, yang menekankan hubungan antara manajemen perusahaan dengan aktor-aktor politik sebagai pihak eksternal yang memiliki kekuasaan atau sumber daya untuk memengaruhi kebijakan publik (Shleifer & Vishny, 1994). Dalam konteks ini, koneksi politik menciptakan hubungan agensial antara perusahaan dan aktor pemerintah yang dapat dieksploitasi untuk memperoleh manfaat pribadi, seperti relaksasi pengawasan atau kemudahan perpajakan. Koneksi politik berfungsi sebagai bentuk *political rent*, yaitu keuntungan ekonomi yang diperoleh bukan dari efisiensi atau inovasi, melainkan dari kedekatan dengan kekuasaan. Maka, temuan ini tidak hanya memperkuat teori agensi klasik (pemilik–manajer), tetapi juga memperluasnya ke ranah hubungan eksternal antara perusahaan dan institusi negara melalui mekanisme koneksi politik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengukuran koneksi politik hanya didasarkan pada status formal komisaris atau direksi yang memiliki latar belakang politik, sehingga koneksi tidak langsung melalui pemilik atau jaringan informal belum terakomodasi. Kedua, cakupan penelitian terbatas pada sektor konstruksi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke sektor lain dengan karakteristik berbeda. Ketiga, penelitian belum mempertimbangkan potensi endogenitas antara koneksi politik dan agresivitas pajak, yang dapat menyebabkan bias dalam penafsiran hubungan kausal. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang rendah dalam model regresi menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang belum ditangkap oleh model, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kualitas tata kelola perusahaan, atau risiko *tunneling*. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan metode panel dengan instrumen seperti 2SLS atau GMM guna mengatasi kemungkinan endogenitas dalam relasi antara koneksi politik dan agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2019–2023*. <https://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2010). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/pbi_120310.aspx
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Chen, X., & Chen, Y. (2019). Political connections and corporate tax avoidance: Evidence from China. *China Journal of Accounting Research*, 12(3), 197–213. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2019.06.003>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fasita, R. D., Firmansyah, M. R., & Irawan, R. (2022). Thin capitalization, transfer pricing, and political connection on tax avoidance: A study on manufacturing companies in Indonesia. *Accounting*, 8(2), 261–268. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.12.013>

- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2013). Politically connected boards of directors and the allocation of procurement contracts. *Review of Finance*, 17(5), 1617–1648. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs039>
- Handoko, B. I., Mardijuwono, A. W., & Lestari, L. P. (2021). Political connections and tax avoidance: Evidence from state-owned enterprises in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1918847. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1918847>
- Iswari, R., Harymawan, I., & Nowland, J. (2023). Corporate political connections and tax avoidance: The moderating role of corporate social responsibility. *International Journal of Accounting & Information Management*, 31(1), 57–78. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2022-0054>
- Khlif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corporate governance and tax avoidance: A meta-analysis. *International Journal of Accounting*, 54(3), 1–21. <https://doi.org/10.1142/S1094406019500095>
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kompas. (2023, April 20). Perusahaan terkoneksi politik dominasi proyek infrastruktur. <https://www.kompas.id>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Liu, X., Cao, S., & Yu, Y. (2018). Political connections and corporate tax avoidance: Evidence from China. *China Journal of Accounting Research*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2017.12.003>
- Rudyanto, A., Julisar, & Debora, D. (2023). The role of business ethics in moderating political connections and tax avoidance behavior during COVID-19. *Journal of Governance and Integrity*, 7(1), 22–30. <https://doi.org/10.15282/jgi.7.1.2023.8317>
- Tempo. (2022, September 12). Proyek-proyek pemerintah dan jejak koneksi politik di baliknya. <https://majalah.tempo.co>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2016-0115>

Zhang, Y., Chen, X., & Li, L. (2021). Political connections and tax avoidance: Evidence from Chinese listed private firms. *Pacific-Basin Finance Journal*, 65, 101483. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101483>